

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia dimana didalamnya dikenal adanya daerah-daerah otonom sebagai konsekuensi dianutnya asas desentralisasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008, terbagi atas daerah-daerah provinsi. Daerah provinsi terdiri atas daerah-daerah kabupaten dan kota. Tiap-tiap daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri pemerintahannya dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat.

Meningkatnya volume pembangunan, naiknya populasi penduduk dan kebutuhan hidup dari tahun ke tahun merupakan masalah yang patut dicermati. Hal ini menuntut peran pemerintah secara berkesinambungan sebagai upaya pemerintah untuk pemecahan masalah dan beban pembangunan. Pemecahan masalah tersebut akan berdampak pada dana yang dibutuhkan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah dibidang pembangunan dan kemasyarakatan.

Dalam rangka menjalankan fungsi dan kewenangan pemerintah daerah dalam bentuk pelaksanaan kewenangan fiskal, daerah harus dapat mengenali potensi dan mengidentifikasi sumber-sumber daya yang dimilikinya. Pemerintah daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli daerah (PAD). Sumber PAD berasal dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lain asli daerah yang sah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) berasal dari potensi yang digali dari suatu daerah yang bersangkutan. PAD adalah suatu usaha daerah yang digunakan untuk memperkecil ketergantungan pemerintah daerah atas pemerintah pusat. PAD menjadi bagian keuangan terbesar bagi pemerintah daerah, yang perlu untuk terus ditingkatkan agar ketergantungan terhadap pemerintah pusat dapat dikurangi,

sehingga daerah tidak terus bergantung dari subsidi pemerintah pusat dan penyelenggaraan pemerintah daerah bisa berjalan lancar sehingga daerah secara bertahap dan berangsur - angsur dapat menjadi daerah mandiri. Dengan demikian daerah dapat dengan leluasa melakukan akselerasi pembangunan daerahnya dengan tanpa beban pengaruh dari pemerintah pusat.

Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan suatu sistem perpajakan Indonesia, yang pada dasarnya merupakan beban masyarakat sehingga perlu dijaga agar kebijakan tersebut dapat memberikan beban yang adil. Sejalan dengan sistem perpajakan nasional, pembinaan pajak daerah dilakukan secara terpadu dengan pajak nasional. Pembinaan ini dilakukan secara terus menerus, terutama mengenai objek, tarif pajak dan retribusi, sehingga antara pajak pusat dan pajak daerah saling melengkapi.

Retribusi daerah merupakan pembayaran wajib dari penduduk kepada negara dikarenakan ada jasa tertentu yang diberikan oleh pemerintah kepada individu secara perorangan. Pungutan dari masyarakat ini akan menjadi sumber pendapatan bagi daerah tersebut, dan bisa dijadikan sumber utama pendapatan daerah selain pajak daerah, bagian laba usaha daerah maupun nilai-nilai PAD yang sah.

PAD yang salah satunya berupa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Dengan demikian, penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah diharapkan nantinya dapat memberikan kontribusi yang positif terhadap PAD dalam hal pencapaian dan pemerataan kesejahteraan masyarakat, yang menjelaskan bahwa peranan sektor pajak daerah dan retribusi yang paling besar kontribusinya terhadap PAD, yang dimana pengelolaannya diserahkan kepada pemerintah daerah itu sendiri. Dalam menyelenggarakan pembangunan di daerahnya, faktor sumber pendapatan daerah dan retribusi daerah sangat menentukan terlaksananya pembangunan daerah itu sendiri (Magdalena, 2010).

Kabupaten dan Kota Provinsi Sumatera Selatan terdiri atas 4 Kota dan 13 Kabupaten. Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Selatan memiliki berbagai macam budaya dan ciri khas tersendiri di setiap Kota dan Kabupatennya. Hal ini yang menjadikan tiap Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Selatan memiliki

cukup banyak kawasan-kawasan wisata yang berpotensi menghasilkan pajak daerah dan retribusi daerah yang cukup besar yang antara lain bersumber dari sektor perdagangan, pertambangan, pertanian serta perkebunan dan pajak lainnya yang terkait dengan pajak daerah, setiap tahunnya penerimaan pajak dan retribusi daerah tidak sama kontribusi pengaruhnya terhadap PAD. Selain itu pemerintah daerah juga dituntut untuk dapat mengalokasikan hasil penerimaan pajak dan retribusi daerah untuk mewujudkan pembangunan dan menunjang keperluan pemerintahan daerah itu sendiri.

Penelitian mengenai PAD telah banyak dilakukan, yang menunjukkan hasil temuan yang berbeda-beda. Penelitian yang dilakukan oleh Pattiasina (2011) bertujuan untuk mengetahui analisis kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah kabupaten Maluku Tenggara. Hasil menunjukkan bahwa dari objek pendapatan dan retribusi yang telah dianalisis dengan metode statistik dengan menggunakan model regresi berganda menggambarkan adanya penerimaan yang bervariasi. Dari kedua objek tersebut yang memberikan kontribusi yang paling baik adalah retribusi daerah. Selain itu, Murtala (2012) juga melakukan penelitian mengenai kontribusi retribusi daerah dan pajak reklame terhadap PAD di provinsi Aceh periode 2000-2010. Hasil penelitian menunjukkan bahwa retribusi daerah dan pajak reklame memiliki kontribusi terhadap PAD di provinsi Aceh.

Apriani (2012) juga melakukan penelitian tentang pengaruh penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap PAD kota Tasikmalaya tahun 2002-2011. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap PAD kota Tasikmalaya sedangkan secara parsial pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap PAD kota Tasikmalaya, namun retribusi daerah secara parsial tidak berpengaruh secara signifikan terhadap PAD kota Tasikmalaya. Nugroho (2014) juga melakukan penelitian tentang Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Periode 2010-2012. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap PAD kabupaten/kota di provinsi Jawa Tengah, secara parsial pajak daerah berpengaruh positif dan

signifikan terhadap PAD kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah sedangkan secara parsial Retribusi daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Dari beberapa penelitian terdahulu, diketahui bahwa pajak daerah dan retribusi daerah berkontribusi dan berpengaruh terhadap PAD.

Pada kabupaten dan kota di provinsi Sumatera Selatan (13 Kabupaten dan 4 kota) terdapat fluktuasi dan kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah (www.djpk.depkeu.go.id). Pada kabupaten Ogan Ilir setiap tahunnya pajak daerah cenderung tidak stabil, dimana pada tahun 2012 realisasi pajak daerah yang dicapai oleh pemerintah kabupaten Ogan Ilir sebesar Rp15.636.000.000, tetapi pada tahun 2013 mengalami penurunan yang signifikan menjadi Rp6.244.000.000. Retribusi daerah kabupaten Ogan Ilir juga mengalami penurunan dimana pada tahun 2012 realisasi kontribusi daerahnya Rp5.960.000.000 jika dibandingkan dengan tahun 2013 yang mencapai Rp4.981.000.000 realisasi tersebut menurun. Pada kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan realisasi pajak daerah tahun 2010 sebesar Rp2.629.000.000, tetapi mengalami penurunan pada tahun 2011 menjadi Rp2.533.000.000. Retribusi daerah kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan juga mengalami penurunan pada tahun 2009 realisasi kontribusi daerahnya Rp1.075.000.000 jika dibandingkan dengan tahun 2010 yang mencapai Rp894.000.000 realisasi tersebut menurun.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan diatas maka penulis ingin melakuakn penelitan dengan judul: “Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Pemerintahan Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Selatan Periode 2009-2013”.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Berapa besar pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Selatan secara simultan?

2. Berapa besar pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Selatan secara parsial?

1.3 Ruang Lingkup Pembahasan

Agar penelitian ini lebih terarah serta tidak menyimpang dari permasalahan yang ada, maka penulis membatasi ruang lingkup pembahasannya, yaitu penelitian ini mengacu pada laporan realisasi PAD Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Selatan Periode 2009-2013.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Selatan secara simultan.
2. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Selatan secara parsial.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Bagi peneliti, dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai rasio Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan Asli Daerah pada Pemerintahan Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Selatan.
2. Bagi Pemerintah Daerah, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran mengenai rasio Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta pengaruhnya terhadap Pendapatan Asli Daerah.
3. Bagi penelitian selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran sehubungan dengan pendapatan asli daerah, dengan memasukkan faktor-faktor lain di luar dari penelitian ini.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara singkat isi skripsi yang terdiri dari 5 (lima) bab. Masing-masing bab dibagi menjadi beberapa sub bab. Sistematika yang dimaksud sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini, dikemukakan latar belakang masalah, perumusan masalah, ruang lingkup pembahasan, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini, penulis menguraikan teori-teori yang mendukung, sumber penerimaan daerah, pajak, pengertian pajak, fungsi pajak, teori pajak, jenis pajak, tata cara pemungutan pajak, pajak daerah, jenis-jenis pajak daerah, retribusi daerah, definisi retribusi daerah, golongan retribusi daerah, pendapatan asli daerah, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang jenis penelitian, populasi dan sampel, jenis dan metode pengumpulan data, identifikasi dan definisi operasional variabel serta model dan teknik analisis yang digunakan.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini dijelaskan hasil analisis dan pembahasan yang dilakukan yaitu gambaran umum provinsi Sumatera Selatan, statistik deskriptif, uji asumsi klasik, uji regresi linear berganda dan uji hipotesis.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini adalah bab terakhir yang mana penulis memberikan kesimpulan dari hasil analisis dan pembahasan pada bab IV, serta saran-saran yang diharapkan akan bermanfaat bagi pemerintah kabupaten/kota Sumatera Selatan dan bagi peneliti selanjutnya.